

DAMPAK KEBIJAKAN HARGA DAN IMPOR BERAS TERHADAP PENGENTASAN KEMISKINAN DI INDONESIA

Impact of Rice Price and Import Policy on Poverty Reduction in Indonesia

Ekalia Yusiana^{1),*}, Luthfi Nur'azkiya²⁾

^{1,2)} Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Singaperbangsa Karawang, Jl. HS. Ronggo Waluyo, Puseurjaya, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat 41361

* E-mail: ekalia.yusiana@faperta.unsika.ac.id

Diterima: 15 Agustus 2021 | Direvisi: 02 September 2021 | Disetujui: 25 September 2021

ABSTRACT

Poverty is one of the goals of development and is used as a measure of the success of economic development. The purpose of this study was to analyze the impact of the implementation of price policies and rice import policies in poverty alleviation. The research model is compiled using time series data with a research time span from 1981 to 2014. The specification of the model used is using an empirical study of multiple linear regression econometric analysis. The results show that there are that have an impact on poverty alleviation, among others: The policy of reducing the price of urea fertilizer by 25 percent is able to reduce poverty by 0,025 percent; The policy of reducing the government purchase price by 25 percent can reduce poverty by 0,035 percent; The abolition of the government's purchase price policy is also able to reduce poverty by 0,142 percent; The policy to increase the area of irrigation by 15 percent can reduce poverty alleviation by 0,002.

Keywords: rice, poverty, price policy, import policy

ABSTRAK

Kemiskinan menjadi salah satu tujuan pembangunan ekonomi dan dijadikan sebagai ukuran keberhasilan pembangunan ekonomi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak penerapan kebijakan harga dan kebijakan impor beras dalam pengentasan kemiskinan. Model penelitian yang disusun menggunakan data *time series* dengan rentang waktu penelitian dari tahun 1981 hingga 2014. Spesifikasi model yang digunakan adalah menggunakan studi empiris analisis ekonometrika regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kebijakan yang memiliki dampak terhadap pengentasan kemiskinan, antara lain: Kebijakan penurunan harga pupuk urea 25 persen mampu mengurangi kemiskinan 0,025 persen; Kebijakan menurunkan harga pembelian pemerintah 25 persen dapat mengurangi kemiskinan sebesar 0,035 persen; Kebijakan Penghapusan harga pembelian pemerintah mengurangi kemiskinan sebesar 0,142 persen; Kebijakan meningkatkan luas areal irigasi sebesar 15 persen dapat mengurangi pengentasan kemiskinan sebesar 0,002.

Kata kunci: beras, kemiskinan, kebijakan harga, kebijakan impor

PENDAHULUAN

Kemiskinan menjadi isu penting yang harus diperhatikan karena kemiskinan merupakan kondisi absolut yang menyebabkan masyarakat disuatu wilayah tidak mempunyai kemampuan untuk

memenuhi kebutuhan dasar sesuai dengan tata nilai yang berlaku di masyarakat yang disebabkan oleh kultural, natural, dan struktural (Nugroho dan Duhri, 2004). Kemiskinan bukan hanya dialami oleh negara berkembang tetapi juga Negara

maju. Permasalahan kemiskinan tentunya membutuhkan upaya atau langkah kebijakan dalam mengurangi kemiskinan, dan kemiskinan dapat memberikan dampak positif maupun negatif bagi berbagai sektor terutama sektor pertanian (Pratiwil* et al., 2020).

Permasalahan kemiskinan disebabkan karena sebagian besar pertumbuhan ekonomi tidak terdistribusi secara merata dan hanya dinikmati kelompok kelas menengah atas. Berdasarkan pengukuran, ketimpangan di Indonesia telah mencapai tingkat yang tinggi yaitu 6,7 % dari total seluruh rumah tangga di Indonesia yang mengalami permasalahan kemiskinan. Sekitar 11,07% dari total rumah tangga tergolong dalam data yang pengeluaran rata-ratanya di bawah garis kemiskinan. Kemiskinan Indonesia menunjukkan 92% yang disebabkan oleh ketimpangan biaya (Purwono et al., 2021). Pengentasan kemiskinan dapat dilakukan melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan selama reformasi dan dapat menciptakan pertumbuhan kelas sosial yang mapan secara ekonomi (World Bank, 2007).

Kemiskinan disebabkan oleh berbagai faktor antara lain pertumbuhan ekonomi, pendidikan, upah minimum dan pengangguran. Upaya yang dilakukan untuk mengurangi kemiskinan harus dilakukan secara menyeluruh hingga mengupus penyebab kemiskinan itu terjadi, antara lain melalui peningkatan pendidikan masyarakat, perluasan lapangan kerja serta penyediaan akses kredit bagi masyarakat miskin. Pertumbuhan ekonomi merupakan ukuran penting dalam melihat pengentasan kemiskinan dan dijadikan kunci utama dalam mengurangi kemiskinan, oleh karena itu upaya ini perlu dilakukan bersama-sama baik oleh masyarakat, pemerintah ataupun *stakeholder*, sehingga pengentasan

kemiskinan dapat teratasi secara merata (Arifin, 2016).

Selain pertumbuhan ekonomi, kemiskinan juga disebabkan oleh infrastruktur yang kurang memadai dan pendapatan perkapita penduduk yang menurun. Berbagai kebijakan perlu dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi kemiskinan dan bersama dengan masyarakat melakukan upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi untuk mengurangi pengentasan kemiskinan di masyarakat sehingga masyarakat dapat hidup di atas garis kemiskinan (Septiadi et al., 2016).

Beras merupakan komoditas pertanian penting yang ketersediaannya harus tetap terjaga karena beras merupakan kebutuhan pangan pokok masyarakat Indonesia. Indonesia memiliki peringkat ke-4 yang menjadi Negara dengan jumlah penduduk besar di Dunia. Kebutuhan konsumsi beras di Indonesia terus meningkat, oleh karena itu Kebijakan penyediaan ketersediaan pangan penting diperhatikan oleh pemerintah sebagai upaya menjaga ketersediaan pangan masyarakat Indonesia. Beberapa wilayah yang menjadi surplus beras di Indonesia antara lain Pulau Jawa, Sumatera dan Sulawesi sedangkan untuk pulau yang mengalami defisit beras adalah Indonesia Timur seperti Provinsi Papua, NTT, NTB dan Maluku (Pratama et al., 2019).

Dinamika kebijakan perberasan dari sisi produsen terus diupayakan oleh pemerintah untuk meningkatkan produksi seperti menerapkan kebijakan subsidi input, kebijakan harga dasar pembelian pemerintah, kredit usahatani, peningkatan luas areal irigasi hingga tarif impor. Dampak langsung dari beragam kebijakan perberasan tersebut berpengaruh pada peningkatan kuantitas dan penurunan harga beras (Manning C, 1987). Pengentasan

kemiskinan merupakan kondisi penting dan harus diperhatikan oleh berbagai pihak baik pemerintah, *stakeholder* maupun masyarakat. Berbagai kebijakan terus diupayakan untuk mengatasi pengentasan kemiskinan, oleh karena itu penelitian tentang dampak kebijakan harga dan impor beras terhadap pengentasan kemiskinan penting dilakukan untuk menganalisis dampak penerapan kebijakan harga dan kebijakan impor beras dalam pengentasan kemiskinan.

METODE PENELITIAN

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data *time series* dengan periode tahunan dalam rentang waktu penelitian dari tahun 1981 sampai 2014. Data dalam penelitian ini diperoleh dari beberapa instansi terkait yaitu Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Pertanian (Kementan) diantaranya adalah jumlah penduduk miskin, pertumbuhan ekonomi, harga beras eceran riil, inflasi, jumlah impor beras, pendapatan per kapita, luas areal padi, harga gabah, kredit usahatani, luas irigasi, curah hujan, luas areal panen, konsumsi beras, harga kedelai, jumlah penduduk, nilai tukar, harga beras eceran, tarif impor, harga beras dunia, harga gabah, harga pupuk urea, produksi padi dan produksi beras.

Untuk kelengkapan serta penyesuaian data juga dilakukan pengumpulan data dari beberapa publikasi seperti World Bank, serta publikasi-publikasi lainnya. Hal yang perlu diperhatikan dalam penelitian ini adalah harga yang digunakan merupakan hasil deflasi dengan indeks harga konsumen tahun dasar (2010=100) dengan tujuan untuk menghilangkan atau menghindari pengaruh inflasi. Sehingga harga nominal yang diperoleh secara langsung dapat menjadi harga riil.

Spesifikasi Model

Model adalah sebagai suatu penjelasan dari fenomena aktual sebagai suatu sistem atau proses (Koutsoyiannis, 1977). Model dalam studi yang dilakukan merupakan studi empiris, yang menggunakan analisis ekonometrika yaitu regresi linier berganda. Model ekonometrika adalah suatu pola khusus dari model aljabar, yakni suatu unsur yang bersifat *stochastic* yang mencakup satu atau lebih variabel pengganggu (Intriligator 1978).

Model ekonometrika merupakan gambaran dari hubungan masing-masing variabel penjelas (*explanatory variables*) terhadap variabel endogen (*dependent variables*) khususnya yang menyangkut tanda dan besaran (*magnitude and sign*) dari penduga parameter sesuai dengan harapan teoritis secara apriori. Model yang baik haruslah memenuhi kriteria teori ekonomi (*theoretically meaningful*), kriteria statistika yang dilihat dari suatu derajat ketepatan (*goodness of fit*) yang dikenal dengan koefisien determinasi (R^2) serta nyata secara statistik (*statistically significant*), sedangkan kriteria ekonometrika menetapkan apakah suatu taksiran memiliki sifat-sifat yang dibutuhkan seperti *unbiasedness, consistency, sufficiency* dan *efficiency*. Statistika Dw adalah salah satu kriteria ekonometrika yang digunakan untuk menguji taksiran, yaitu menguji validitas dari asumsi *autocorrelation* (Koutsoyiannis 1977). Ada 11 model regresi yang akan diestimasi. Seluruh data yang digunakan untuk regresi adalah data runtut waktu (*time series*) periode 1998 – 2014.

Persamaan Kemiskinan

Model kemiskinan dalam studi ini diduga dipengaruhi oleh Pertumbuhan

Ekonomi (GWT), Harga Bahan Bakar Minyak (Premium), Harga Beras Eceran (HBER), Pengeluaran Pemerintah untuk Infrastruktur (GI), Inflasi (INF, jumlah impor beras Indonesia (JIB) dan Pendapatan Perkapita Penduduk Indonesia (PPP). Persamaannya adalah sebagai berikut:

$$POV_t = g_0 + g_1GWT_t + g_2HBBMR_t + g_3GI_t + g_4PPP1_t + g_5LJIB_t + g_6HBER_t + g_7POV_{t-1} + g_8LINF_t + U_7 \dots \dots \dots (1)$$

Keterangan :

- POV_t = Jumlah Penduduk Miskin Indonesia (Jiwa)
- GWT_t = Pertumbuhan Ekonomi (Persen)
- HBBMR_t = Harga Bahan Bakar Minyak (Premium) Riil (Rupiah/Liter)
- HBER_t = Harga Beras Eceran Riil (Rp/Kg)
- GI_t = Pengeluaran Pemerintah untuk Infrastruktur (Rp)
- LINF_t = Tingkat Inflasi Tahun sebelumnya (Persen)
- LJIB_t = Jumlah impor beras Indonesia tahun sebelumnya (Kg)
- PPP1_t = Rasio pendapatan perkapita penduduk Indonesia (Rp)
- POV_{t-1} = Jumlah Penduduk Miskin Indonesia Tahun sebelumnya (Jiwa)
- U₇ = Variabel pengganggu

Tanda dan besaran parameter dugaan yang diharapkan adalah:

$$g_1, g_3, g_4 < 0; g_2, g_8, g_5, g_6 > 0; \text{ dan } 0 < g_7 < 1.$$

Persamaan Luas Areal Panen Padi

Model persamaan luas areal panen padi merupakan persamaan struktural, dimana dipengaruhi oleh Harga Gabah Tingkat Petani (HGTP), Kredit Usaha Tani (KUT), Luas Areal Irigasi (LASI), tingkat Curah

Hujan (CH) dan luas areal panen padi tahun sebelumnya. Persamaannya adalah sebagai berikut:

$$LAP_t = a_0 + a_1LHGTPR_t + a_2KUTR_t + a_3LASI_t + a_4CH_t + a_5LAP_{t-1} + U_1 \dots \dots \dots (2)$$

Keterangan:

- LAP_t = Luas areal panen padi (Ha)
- LHGTPR_t = Lag Harga gabah tingkat petani (Rp/Kg)
- KUTR_t = Kredit Usahatani Riil (Rp)
- LASI_t = Luas areal irigasi (Ha)
- CH_t = Curah hujan (mm/tahun)
- LAP_{t-1} = Lag luas areal panen (Ha)
- U₁ = Variabel pengganggu

Tanda dan besaran parameter dugaan yang diharapkan adalah:

$$a_1, a_2, a_3, a_4 > 0 ; \text{ dan } 0 < a_5 < 1$$

Persamaan Produktivitas Padi

Persamaan struktural selanjutnya adalah produktivitas padi, dimana produktivitas padi dipengaruhi oleh Harga Gabah Tingkat Petani (HGTP), Harga Pupuk Urea (HPU), Curah Hujan (CH) dan produktivitas padi tahun sebelumnya. Persamaannya adalah sebagai berikut:

$$YPP_t = b_0 + b_1HGTPR_t + b_2HPUR2_t + b_3CH_t + YPP_{t-1} + U_2 \dots \dots \dots (3)$$

Keterangan:

- YPP_t = Produktivitas padi (Kg/ha)
- HGTPR_t = Harga gabah tingkat petani riil (Rp/Kg)
- HPUR2_t = Rasio Harga Pupuk Urea Riil (Rp/Kg)
- CH_t = Curah hujan (mm/tahun)

YPPt-1 = Lag produktivitas padi
 U2 = Variabel pengganggu

Tanda dan besaran parameter dugaan yang diharapkan adalah :

$$b1, b3 > 0; b2 < 0 ; \text{ dan } 0 < b4 < 1$$

Persamaan Jumlah Impor Beras

Model persamaan impor beras Indonesia dipengaruhi oleh Harga Beras Impor Indonesia (HIBIR), nilai tukar (ER), Stok Beras Awal Tahun (SBAT), Permintaan Beras Indonesia (DBIN), Harga Beras Eceran (HBER) dan jumlah impor beras tahun sebelumnya. Persamaannya adalah sebagai berikut:

$$JIBt = c0 + c1HIBIRt + c2ER1t + c3SBATt-1 + c4LDBINt + c5HBERt + c6JIBt-1 + U3..... (4)$$

Keteranga:

- JIBt = Jumlah impor beras Indonesia (Kg)
- HIBIRt = Harga Beras Impor Indonesia Riil (US\$/Kg)
- ERt = Nilai tukar Rupiah terhadap Dollar (Rp/US\$)
- LSBATt = Stok beras awal tahun di Bulog (Kg)
- LDBINt = Lag Permintaan Beras Indonesia (Kg)
- HBERt = Harga Beras Eceran Riil (Rp/Kg)
- JIBt-1 = Lag jumlah impor beras Indonesia (Kg)
- U3 = Variabel pengganggu

Tanda dan besaran parameter dugaan yang diharapkan adalah :

$$c1, c2, c3, < 0 \text{ c4, c5 } > 0 \text{ dan } 0 < c6 < 1$$

Persamaan Harga Impor Beras

Harga impor beras Indonesia dipengaruhi oleh Harga Beras Dunia Riil (HBDR), Tarif Impor Beras Indonesia Riil (TARIFR) dan harga beras impor Indonesia tahun sebelumnya (LHIBIR).

$$HIBIRt = d0+ d1HBDRt+ d2TARIFRt + d3HIBIRt-1 + U4..... (5)$$

Keterangan:

- HBDRt = Harga beras dunia Riil (US\$/Kg)
- TARIFRt = Tarif impor beras Indonesia (persen).
- HIBIRt-1 = Lag harga impor beras Indonesia (US\$/Kg)
- U4 = Variabel pengganggu

Tanda dan besaran parameter dugaan yang diharapkan adalah :

$$d1, d2 > 0 \text{ dan } 0 < d3 < 1.$$

Persamaan Permintaan Beras

Jumlah Permintaan beras Indonesia dipengaruhi oleh Harga Pokok Pembelian Pemerintah Beras Riil (HPPBR), Harga Kedelai Tingkat Petani (HKTP), Pendapatan Perkapita Penduduk Indonesia (PPP), Jumlah Penduduk Indonesia (JPI), kemiskinan (POV) dan permintaan beras tahun sebelumnya. Persamaannya adalah sebagai berikut:

$$DBINt = e0 + e1HPPBRt + e2LHKTPRt + e3JPIt + e4PPP2t + e5POVt + e6DBINt-1 + U5..... (6)$$

Keterangan:

- DBINt = Jumlah konsumsi beras untuk pangan (Kg)
- HPPBRt = Harga Pokok Pembelian Pemerintah Beras riil (Rp/Kg)
- LHKTPRt = Lag Harga Kedelai Riil (Rp/Kg)
- PPP2t = Rasio Pendapatan Perkapita Penduduk Indonesia (Rp)
- POVt = Jumlah Penduduk Miskin Indonesia (Jiwa)
- JPIt = Jumlah Penduduk Indonesia (000 Jiwa)
- DBINt-1 = Lag jumlah konsumsi beras untuk pangan

U5 = Variabel pengganggu

Tanda dan besaran parameter dugaan yang diharapkan adalah :

$$e_3, e_4 > 0; e_1, e_2, e_5 < 0 \text{ dan } 0 < e_6 < 1$$

Persamaan Harga Eceran Beras

Selanjutnya persamaan harga eceran beras di Indonesia dipengaruhi oleh produksi beras Indonesia (PBI), Harga Pembelian Pemerintah Beras riil (HPPBR), harga pupuk urea riil (HPUR), harga gabah tingkat petani riil (HGTPR) dan harga eceran beras tahun sebelumnya. Persamaannya adalah sebagai berikut:

$$HBERT = f_0 + f_1PBI_t + f_2HPPBR_{1t} + f_3HPUR_t + f_4HGTPR_t + f_5HBERT_{-1} + U_6 \dots \dots \dots (7)$$

Keterangan:

- HBERT = Harga beras eceran riil (Rp/Kg)
- PBI_t = Produksi beras Indonesia (Kg)
- HPPBR_t = Harga pembelian pemerintah beras riil (Rp/Kg)
- HPUR_t = Harga pupuk urea riil (Rp/Kg)
- HBERT₋₁ = Lag harga beras eceran Indonesia
- HGTPR = Harga gabah tingkat petani riil (Rp/Kg)
- U6 = Variabel pengganggu

Tanda dan besaran parameter dugaan yang diharapkan adalah:

$$f_1 < 0 ; f_2, f_3, f_4 > 0 \text{ dan } 0 < f_5 < 1$$

Persamaan Penawaran Beras

Diketahui bahwa model penawaran beras Indonesia merupakan persamaan identitas, dimana penawaran beras Indonesia berasal dari Produksi Beras Indonesia (PBI) dikurangi jumlah beras untuk benih, penggunaan lain/susut (JBB) ditambah stok beras akhir tahun tahun sebelumnya (LSBAT) dan ditambah jumlah

beras yang di impor Indonesia (JIB). Persamaannya adalah sebagai berikut:

$$QSBI_t = PBI_t - JBB_t + LSBAT_t + JIB_t \dots \dots \dots (8)$$

Keterangan:

- QSBI_t = Penawaran beras Indonesia (Kg)
- PBI_t = Produksi beras Indonesia (Kg)
- JBB_t = Jumlah beras untuk benih, penggunaan lain/susut (Kg)
- LSBAT_t = Stok beras akhir tahun di Bulog T-1 (Kg)
- JIB_t = Jumlah impor beras Indonesia (Kg)

Persamaan Produksi Padi Indonesia

Persamaan produksi padi Indonesia merupakan perkalian antara luas areal penanaman padi (LAP) dikalikan dengan produktivitas (YPP). Persamaannya adalah sebagai berikut:

$$PPI_t = LAP_t * YPP_t \dots \dots \dots (9)$$

Persamaan Produksi Beras Indonesia

Selanjutnya, jumlah produksi beras Indonesia diperoleh dari perkalian antara produksi padi (PPI) dengan angka konversi (K). Persamaannya adalah sebagai berikut:

$$PBI_t = PPI_t * K_t \dots \dots \dots (10)$$

Persamaan Jumlah beras untuk benih, penggunaan lainnya, susut dan Tercecer

Sedangkan jumlah beras untuk benih, susut/lainnya merupakan perkalian antara Proporsi beras untuk benih, penggunaan lain/susut (PROB) sebanyak 10persen dengan produksi beras Indonesia (PBI).

$$JBB_t = PROB_t * PBI_t \dots \dots \dots (11)$$

Keterangan :

- PPI_t = Produksi Padi Indonesia (Kg)

- LAPt = luas Areal Panen Padi (Ha)
- YPPt = Produktivitas Padi (Kg/ha)
- PBI_t = Produksi Beras Indonesia (Kg)
- K_t = Angka Konfersi (63 persen)
- PROB_t = Proporsi beras untuk benih, penggunaan lain/susut (10 persen)

Identifikasi Model

Menurut Koutsoyiannis (1977) suatu persamaan dapat dikatakan teridentifikasi apabila memenuhi syarat *order condition*. Kondisi order didasarkan atas kaidah penghitungan variabel-variabel yang dimasukan dan dikeluarkan dari suatu persamaan tertentu. Identifikasi model persamaan struktural berdasarkan *order condition* sebagai berikut:

- a) $(K - M) > (G - 1)$: Persamaan dinyatakan *over identified*
- b) $(K - M) = (G - 1)$: Persamaan dinyatakan *exactly identified*
- c) $(K - M) < (G - 1)$: Persamaan dinyatakan *under identified*

Dimana:

- K = Total variabel dalam model, yaitu variable endogen dan predetermined variable (*current exogenous variable, lagged exogenous variable, dan lagged endogenous variable*).
- M = Jumlah variabel endogen dan eksogen yang termasuk dalam satu persamaan tertentu dalam model, dan
- G = Total persamaan dalam model, yaitu jumlah variabel endogen dalam model.

Hasil Identifikasi untuk setiap persamaan struktural haruslah *exactly identified* atau *overidentified* untuk dapat menduga parameter-parameternya. Pada studi ini, model terdiri dari 11 variabel endogen dan 17 variabel eksogen dengan lag sebesar 9 variabel. Berdasarkan ketentuan kriteria identifikasi model di atas,

maka semua persamaan struktural yang disusun dalam penelitian ini bersifat teridentifikasi berlebih (*overidentified*).

Validasi Model

Validasi model bertujuan untuk mengetahui tingkat representasi model dibandingkan dengan dunia nyata sebagai dasar untuk melakukan simulasi. Berbagai kriteria statistik dapat digunakan untuk validasi model ekonometrika dengan membandingkan nilai-nilai aktual dan dugaan variabel-variabel endogen. Validasi model dilakukan dengan menggunakan *Root Means Squares Error (RMSE)*, *Root Means Percent Squares Error (RMSPE)* dan *Theil's Inequality Coefficient (U)* (Pindyck dan Rubinfeld 1991). Rumus penghitungannya adalah sebagai berikut:

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{t=1}^n (Y_t^s - Y_t^a)^2} \quad ..(12)$$

$$RMSPE = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{t=1}^n \left(\frac{Y_t^s - Y_t^a}{Y_t^a} \right)^2} \quad ..(13)$$

$$U = \frac{\sqrt{\frac{1}{n} \sum_{t=1}^n (Y_t^s - Y_t^a)^2}}{\sqrt{\frac{1}{n} \sum_{t=1}^n (Y_t^s)^2} + \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{t=1}^n (Y_t^a)^2}} \quad ..(14)$$

Dimana:

- yst = Nilai hasil simulasi dasar dari variabel observasi
- y^{ta} = Nilai aktual variabel observasi
- n = Jumlah periode observasi

Statistik RMSPE digunakan untuk mengukur seberapa jauh nilai-nilai variabel endogen hasil pendugaan menyimpang dari alur nilai-nilai aktualnya dalam ukuran relatif (persen), atau seberapa dekat nilai dugaan itu mengikuti perkembangan nilai aktualnya. Sedangkan nilai statistik U bermanfaat untuk mengetahui kemampuan model untuk analisis simulasi peramalan. Nilai koefisien Theil (U) berkisar antara 0

dan 1. Jika $U = 0$ maka pendugaan model sempurna, jika $U = 1$ maka pendugaan model naif. Disamping itu, validasi model juga dapat dijelaskan dari nilai koefisien determinasi (R^2), semakin besar nilai tersebut semakin besar proporsi variasi perubahan variabel endogen yang dapat dijelaskan oleh variasi dalam variabel penjelas sehingga model semakin baik.

Simulasi Model

Tujuan simulasi model adalah untuk melakukan pengujian dan evaluasi terhadap model, mengevaluasi kebijakan-kebijakan pada masa lampau, membuat peramalan untuk masa yang akan datang (Pindyck, 1991). Beberapa skenario simulasi alternatif kebijakan ekonomi beras yang dilakukan difokuskan pada kebijakan harga pembelian pemerintah, harga pupuk urea, tarif impor, dan luas areal irigasi. Hal ini dikarenakan tujuan penelitian ini untuk menganalisis dampak dari kebijakan harga dan tarif impor terhadap pengentasan kemiskinan di Indonesia. Beberapa instrumen kebijakan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut.

1. Meningkatkan harga pupuk urea sebesar 25 persen. Alternatif ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana dampak dari penghapusan subsidi pupuk terhadap kemiskinan di Indonesia.
2. Menurunkan harga pupuk urea sebesar 25 persen. Alternatif ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana dampak penurunan harga pupuk terhadap peningkatan produksi beras dan bagaimana pengaruhnya terhadap kemiskinan.
3. Menurunkan tarif impor beras sebesar 0 persen. Alternatif ini dilakukan untuk mengetahui dampak yang akan terjadi apabila pemerintah menghapuskan kebijakan tarif impor beras sebesar 0

persen terhadap penawaran dan permintaan beras serta bagaimana dampaknya terhadap kemiskinan.

4. Meningkatkan harga pembelian pemerintah 25 persen. Alternatif ini dilakukan untuk mengetahui dampak yang akan terjadi apabila pemerintah meningkatkan harga pembelian pemerintah sebesar 25 persen yang merupakan angka pertumbuhan harga pembelian pemerintah setiap tahun. Peningkatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan produksi padi serta meningkatkan kesejahteraan petani.
5. Menurunkan harga pembelian pemerintah 25 persen. Alternatif ini untuk mengetahui dampak dari penurunan harga pembelian pemerintah terhadap tingkat kemiskinan.
6. Kebijakan penghapusan harga pembelian pemerintah. Alternatif ini dilakukan agar harga beras diserahkan kepada mekanisme pasar.
7. Meningkatkan luas areal irigasi sebesar 15 persen. Alternatif ini merupakan turunan dari kebijakan yang tertuang dalam rencana strategis Kementerian Pertanian 2014-2019 yang menargetkan perluasan areal irigasi sebesar 500.000 ha/tahun. Apabila dibandingkan dengan kondisi luas areal irigasi saat ini, maka peningkatannya sebesar 15 persen. Kebijakan ini diharapkan meningkatkan produksi padi dan mampu mengurangi kemiskinan di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keragaan Umum Hasil Estimasi Pendugaan Model Ekonometrika

Model ekonometrika dalam penelitian ini merupakan model yang dibangun melalui beberapa tahapan respesifikasi model. Data yang digunakan adalah data deret waktu (*time series*) dengan periode pengamatan tahun 1981

sampai dengan 2014. Berdasarkan hasil estimasi yang dapat dijelaskan bahwa secara umum semua variabel penjelas yang dimasukkan kedalam persamaan-persamaan perilaku mempunyai tanda yang sesuai dengan harapan, khususnya dilihat dari teori ekonomi. Kriteria-kriteria statistika yang umum digunakan dalam mengevaluasi hasil estimasi model cukup meyakinkan. Hasil estimasi parameter, R², nilai uji-F, uji-t, dan nilai elastisitas untuk setiap persamaan struktural.

Persamaan Kemiskinan

Tabel 1. Hasil Pendugaan Variabel Kemiskinan

Variable	Elastisitas		Variable Label
	SR	LR	
Intercept			Intercept
GWT	-0,132	-0,333	Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (%)
HBBMR	0,043	0,109	Harga Bahan Bakar Minyak Premium Riil (Rp/Liter)
GI	-0,039	-0,099	Pengeluaran Pemerintah Untuk Infrastruktur (Rp)
PPP1	0,000	0,000	Rasio Pendapatan Perkapita
LJIB	0,013	0,031	Jml Impor Beras T-1
HBER	0,022	0,057	Harga Beras Eceran Riil (Rp/Kg)
LINF	0,002	0,002	Inflasi T-1
LPOV			Jumlah Penduduk Miskin Indonesia T-1

R-Square: 0,86444, Fhitung: 19,13

Berdasarkan Tabel 1 dapat diketahui bahwa respon negatif yang mempengaruhi kemiskinan di Indonesia adalah pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah untuk infrastruktur, dan pendapatan perkapita penduduk Indonesia. Sementara itu variabel harga bahan bakar

minyak (premium), inflasi tahun sebelumnya, jumlah impor beras tahun sebelumnya, harga beras eceran Indonesia dan kemiskinan tahun sebelumnya memberikan pengaruh yang positif terhadap kemiskinan di Indonesia. Pengaruh variabel pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan dalam jangka pendek yakni sebesar 0,132 dan jangka panjang yakni sebesar 0,333. Artinya kenaikan 1 persen pertumbuhan ekonomi akan menurunkan jumlah kemiskinan Indonesia sebesar 0,132 persen dalam jangka pendek dan menurunkan jumlah kemiskinan Indonesia sebesar 0,333 persen dalam jangka panjang. Hal ini menandakan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan masih menjadi alternatif yang baik dalam mengurangi jumlah penduduk miskin di Indonesia. Harga bahan bakar minyak (premium) memiliki pengaruh terhadap kemiskinan Indonesia. Secara ekonomi pendugaan kemiskinan terhadap perubahan harga BBM dalam jangka pendek sebesar 0,043 dan jangka panjang 0,109. Artinya kenaikan 1 persen harga BBM akan menaikkan jumlah kemiskinan Indonesia sebesar 0,043 persen dalam jangka pendek dan menaikkan jumlah kemiskinan Indonesia sebesar 0,109 persen dalam jangka panjang. Temuan ini mampu menjelaskan bahwa kenaikan harga BBM memiliki potensi menambah jumlah penduduk miskin di Indonesia, sehingga perlu dipertimbangkan terkait dampak pasca menaikkan harga BBM.

Pengaruh variabel pengeluaran pemerintah untuk infrastruktur terhadap kemiskinan Indonesia memiliki pengaruh yang tidak nyata secara statistik. Secara ekonomi respon variabel kemiskinan Indonesia terhadap perubahan pengeluaran pemerintah untuk infrastruktur adalah inelastis baik dalam jangka pendek yakni

sebesar 0,039 maupun dalam jangka panjang yakni sebesar 0,099. Secara ekonomi kemiskinan juga tidak responsif (*inelastis*) terhadap perubahan inflasi baik dalam jangka pendek yakni sebesar 0,002 maupun dalam jangka panjang yakni sebesar 0,002. Secara ekonomi respon variabel kemiskinan terhadap perubahan jumlah impor beras pada tahun sebelumnya dalam jangka pendek yakni sebesar 0,013 maupun dalam jangka panjang yakni sebesar 0,031.

Berdasarkan Tabel 1 menunjukkan bahwa persamaan kemiskinan Indonesia dapat dikatakan baik, dimana nilai koefisien determinasinya $R^2 = 0,86444$, artinya variasi perubahan variabel endogen dapat dijelaskan sebesar 86 persen oleh variasi variabel penjelas, sedangkan 14 persen lagi dijelaskan oleh faktor lain di luar persamaan. Sedangkan hasil uji statistik $F_{hitung} = 19,13$, artinya peubah penjelas dari persamaan Kemiskinan Indonesia tersebut secara bersama-sama dapat menjelaskan dengan baik perilaku Kemiskinan Indonesia.

Persamaan Luas Areal Panen Padi

Tabel 2. Hasil Pendugaan Parameter Variabel Luas Areal Panen

Variable	Elastisitas		Variable Label
	SR	LR	
Intercept			Intercept
HGTPR	0,040	0,118	Harga Gabah Tingkat Petani Riil (Rp/Kg)
KUTR	0,005	0,016	Kredit Usaha Tani Riil (Rp)
LASI	0,087	0,257	Luas Areal Irigasi (Ha)
CH	0,046	0,136	Curah Hujan (Mm/Tahun)
LLAP			Luas Areal Panen T-1

R-Square: 0,92364, Fhitung: 65,32

Pada Tabel 2 dapat diketahui bahwa respon luas areal panen berhubungan positif dengan harga gabah tingkat petani, kredit usahatani, luas areal irigasi, curah hujan,

dan luas areal panen tahun sebelumnya. Luas areal panen tidak responsif (*inelastis*) terhadap perubahan harga gabah tingkat petani, dengan elastisitas jangka pendek sebesar 0,040 dan jangka panjang sebesar 0,118. Artinya harga gabah tingkat petani berpengaruh terhadap perubahan luas areal panen tetapi dengan perubahan yang kecil. Peningkatan 1 persen harga gabah tingkat petani akan meningkatkan luas areal panen sebesar 0,040 persen dalam jangka pendek dan meningkat sebesar 0,118 persen dalam jangka panjang.

Secara statistik, luas areal panen padi di Indonesia dipengaruhi oleh variabel luas areal irigasi dan curah hujan, sedangkan luas areal panen tahun sebelumnya berpengaruh signifikan terhadap variabel luas areal panen pada taraf signifikansi 5%. Respon variabel luas areal panen padi di Indonesia tidak responsif (*inelastis*) terhadap perubahan variabel luas areal irigasi dan curah hujan. Elastisitas variabel luas areal irigasi dalam jangka pendek dan jangka panjang sebesar 0,087 dan 0,257. Variabel curah hujan sebesar 0,046 dan 0,136.

Persamaan Produktivitas Padi

Tabel 3. Hasil Pendugaan Parameter Variabel Produktivitas

Variable	Elastisitas		Variable Label
	SR	LR	
Intercept			Intercept
HGTPR	0,02146	0,090104	Harga Gabah Tingkat Petani Riil (Rp/Kg)
HPUR2	-765636	3214610	- Rasio Harga Pupuk Urea Curah Hujan
CH	0,035044	0,147137	(Mm/Tahun) Produktivitas
LYPP			T-1

R-Square: 0,97104, Fhitung: 234,74

Berdasarkan Tabel 3 produktivitas padi di Indonesia dipengaruhi oleh harga gabah tingkat petani, rasio harga pupuk

urea, tingkat curah hujan dan tingkat produktivitas tahun sebelumnya. Respon produktivitas terhadap perubahan harga gabah tingkat petani adalah *inelastis*, dengan elastisitas jangka pendek sebesar 0,021 dan jangka panjang sebesar 0,090. Artinya, peningkatan 1 persen harga gabah tingkat petani akan meningkatkan produktivitas sebesar 0,021 persen dalam jangka pendek dan meningkat sebesar 0,090 persen dalam jangka panjang.

Variabel rasio harga pupuk urea berpengaruh tidak nyata dengan produktivitas dengan hubungan yang negatif. Artinya kenaikan atau penurunan harga pupuk urea akan berdampak kepada penurunan atau kenaikan produktivitas panen padi. Hal ini disebabkan jika terjadi kenaikan harga pupuk urea, maka para petani akan menggunakan pupuk urea lebih sedikit dari penggunaan ideal pupuk urea pada tanaman padi petani. Dampaknya adalah produktivitas juga ikut menurun seiring kurangnya penggunaan pupuk urea tersebut. Respon produktivitas *inelastis* dalam jangka pendek terhadap perubahan harga pupuk urea dengan elastisitas sebesar 0,765 dan jangka panjang produktivitas responsif (*elastis*) terhadap perubahan harga pupuk urea dengan elastisitas 3,21.

Persamaan Jumlah Impor Beras

Berdasarkan estimasi persamaan jumlah impor beras pada tabel 4, Variabel rasio harga beras eceran di dalam negeri dan jumlah impor beras tahun sebelumnya memiliki pengaruh positif, akan tetapi jumlah impor beras Indonesia tidak responsif (*inelastis*) terhadap perubahan harga beras eceran dengan elastisitas sebesar 1,691 dalam jangka pendek dan sebesar 3,899 dalam jangka panjang. Artinya kenaikan 1 persen harga beras eceran di dalam negeri akan menaikkan jumlah impor beras sebesar 1,691 persen

dalam jangka pendek dan menaikkan impor beras sebesar 3,899 persen dalam jangka panjang.

Tabel 4. Hasil Pendugaan Parameter Variabel Jumlah Impor Beras

Variable	Elastisitas		Variable Label
	SR	LR	
Intercept			Intercept
HIBIR2	-1,762	-4,061	Perubahan Harga Beras Impor
ER1	-0,003	-0,007	Perubahan Nilai Tukar
LSBAT	-0,310	-0,715	Stok Beras Akhir Thn T-1
LDBIN	1,179	2,718	Konsumsi Beras Ind T-1
HBIR2	1,691	3,899	Rasio Harga Beras Eceran Jml Impor Beras T-1
LJIB			T-1

R-Square: 0,46859, Fhitung: 3,82

Persamaan Harga Beras Impor

Tabel 5. Hasil Pendugaan Parameter Variabel Harga Beras Impor

Variable	Elastisitas		Variable Label
	SR	LR	
Intercept			Intercept
HBDR1	0,009	0,556	Perubahan Harga Beras Dunia
TARIFR1	0,00	0,00	Perubahan Tarif Impor Beras
LHIBIR			Harga Beras Impor T-1

R-Square : 0,93332, Fhitung: 135,30

Pada Tabel 5 dapat diketahui bahwa harga beras impor dipengaruhi secara positif oleh harga beras dunia dan tarif impor serta harga beras impor tahun sebelumnya. Dalam jangka pendek harga beras impor tidak responsif terhadap perubahan harga beras dunia dengan elastisitas sebesar 0,009. Namun dalam jangka panjang harga beras impor responsif terhadap perubahan harga beras dunia dengan elastisitas sebesar 0,556. Artinya kenaikan 1 persen harga beras dunia akan meningkatkan harga beras impor sebesar

0,009 dalam jangka pendek dan sebesar 0,556 dalam jangka panjang. Hal ini menandakan harga beras dunia menjadi salah satu faktor penting dalam mempengaruhi perubahan harga beras impor.

Persamaan Permintaan Beras

Persamaan permintaan beras untuk konsumsi dipengaruhi secara negatif oleh harga beras eceran, harga kedelai tingkat petani dan jumlah penduduk miskin dan secara positif oleh pendapatan perkapita dan jumlah penduduk.

Respon permintaan beras Indonesia terhadap perubahan jumlah penduduk miskin adalah *inelastis* dalam jangka pendek 0,05 dan jangka panjang sebesar 0,10.

Secara ekonomi, permintaan beras Indonesia tidak responsif terhadap perubahan jumlah penduduk Indonesia dalam jangka pendek yakni sebesar 0,71, akan tetapi responsif dalam jangka panjang sebesar 1,51. Artinya 1 persen kenaikan jumlah penduduk Indonesia akan menaikkan permintaan beras Indonesia sebesar 0,71 persen dalam jangka pendek dan sebesar 1,51 persen dalam jangka panjang.

Tabel 6. Hasil Pendugaan Parameter Variabel Permintaan Beras

Variable	Elastisitas		Variable Label
	SR	LR	
Intercept			Intercept
HBER	-	-	Harga Beras Eceran Riil (Rp/Kg)
	0,03	0,07	
LHKTPR	-	-	Harga Kedelai Tkt Petani Riil T-1
	0,01	0,02	
JPI	0,71	1,51	Jumlah Penduduk Indonesia (000 Jiwa)
PPP2	0,01	0,02	Rasio Pendapatan Perkapita
POV	-	-	Jumlah Penduduk Miskin Indonesia (Juta Jiwa)
	0,05	0,10	
LDBIN			Konsumsi Beras Ind T-1

R-Square : 0,92882, Fhitung : 56,54

70

Persamaan Harga Eceran Beras

Tabel 7. Hasil Pendugaan Parameter Variabel Harga Beras Eceran Indonesia

Variable	Elastisitas		Variable Label
	SR	LR	
Intercept			Intercept
PBI2	-	-	
	0,061	0,066	
HPPBR1	0,008	0,009	Rasio Produksi Beras Perubahan Harga Pembelian Pemerintah
HPUR	0,062	0,067	Harga Pupuk Urea Riil (Rp/Kg)
HGTPR	0,912	0,985	Harga Gabah Tingkat Petani Riil (Rp/Kg)
LHBER			Harga Eceran T-1

R-Square: 0,99825, Fhitung: 3085,35

Respon Harga beras eceran Indonesia terhadap perubahan produksi beras Indonesia adalah *inelastis*, baik jangka pendek (0,061) maupun jangka panjang (0,066), artinya perubahan peningkatan produksi beras Indonesia sebesar satu persen akan menurunkan harga beras eceran sebesar 0,061 persen pada jangka pendek dan 0,066 persen pada jangka panjang.

Harga beras eceran tidak responsif terhadap perubahan harga pembelian pemerintah dengan elastisitas jangka pendek sebesar 0,008 dan elastisitas jangka panjang sebesar 0,009. Secara ekonomi, harga beras eceran tidak responsif terhadap perubahan harga pupuk urea dengan elastisitas jangka pendek sebesar 0,062 dan elastisitas jangka panjang sebesar 0,067. Artinya apabila terjadi peningkatan harga pupuk urea sebesar 1 persen, maka akan meningkatkan harga beras eceran sebesar 0,062 persen dalam jangka pendek dan 0,067 persen dalam jangka panjang. Hal ini menandakan harga pupuk urea tidak menjadi faktor penting dalam mempengaruhi harga beras eceran.

Analisis Simulasi Kebijakan

Kebijakan harga dan impor beras dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia

Kebijakan yang dijadikan sebagai instrumen kebijakan antara lain kebijakan harga pembelian pemerintah, harga pupuk urea, tarif impor beras, kredit usahatani dan luas areal irigasi. Alternatif kebijakan pemerintah dalam menetapkan harga pembelian pemerintah adalah dengan menaikkan dan menurunkan harga. Sedangkan kebijakan tarif impor beras adalah dengan menghapuskan kebijakan tarif impor yang mengikuti ketentuan perdagangan bebas. Alternatif kebijakan harga pupuk urea juga dengan meningkatkan harga pupuk urea sebagai bentuk kebijakan pemerintah dalam pengurangan/pencabutan subsidi pupuk serta menurunkannya sebagai bentuk penambahan subsidi pupuk urea. Alternatif kebijakan kredit usahatani yang dilakukan adalah dengan meningkatkan kredit usahatani. Kebijakan ini berdasar pada kebijakan pemerintah yang tertuang dalam APBN. Dimana nilai kredit pertanian trennya terus mengalami peningkatan. Sedangkan kebijakan luas areal irigasi juga diasumsikan mengalami kenaikan mengikuti rencana strategis Kementerian Pertanian yang berupaya untuk terus memperluas areal irigasi dalam mencapai target peningkatan produktivitas padi.

Kebijakan meningkatkan harga pupuk urea sebesar 25 persen

Secara keseluruhan, dampak kebijakan peningkatan harga pupuk urea 25% berdampak negatif pada produktivitas, produksi padi, dan beras susut, benih serta permintaan beras di Indonesia. Tabel 8 menunjukkan dampak kebijakan peningkatan pupuk urea berdampak pada penurunan produktivitas sebesar 0,023 persen, hal tersebut berdampak pula pada penurunan produksi sebesar 0,020 persen serta penurunan permintaan beras sebesar

0,036 persen. Sebaliknya, kebijakan peningkatan harga pupuk urea meningkatkan harga beras eceran sebesar 1,539 persen yang berdampak juga pada kemiskinan sebesar 0,025 persen.

Tabel 8. Dampak kebijakan peningkatan harga pupuk urea sebesar 25%

Variable	perubahan (%)	Keterangan
POV	0,025	Kemiskinan
LAP	0,000	Luas Areal Panen
YPP	-0,023	Produktivitas
PPI	-0,020	Produksi Padi Indonesia
PBI	0,000	Produksi Beras Indonesia
JBB	-0,025	Beras Susut, Benih, dll
JIB	4,085	Jumlah Impor Beras
QSBI	0,125	Penawaran Beras
DBIN	-0,036	Permintaan Beras
HBER	1,539	Harga Beras Eceran
HIBIR	0,000	Harga Beras Impor

Menurunkan harga pupuk urea sebesar 25 persen

Tabel 9. Dampak kebijakan menurunkan harga pupuk urea sebesar 25%

Variable	perubahan (%)	Keterangan
POV	-0,025	Kemiskinan
LAP	0,000	Luas Areal Panen
YPP	0,023	Produktivitas
PPI	0,039	Produksi Padi Indonesia
PBI	0,031	Produksi Beras Indonesia
JBB	0,022	Beras Susut, Benih, dll
JIB	-4,085	Jumlah Impor Beras
QSBI	-0,094	Penawaran Beras
DBIN	0,036	Permintaan Beras
HBER	-1,544	Harga Beras Eceran
HIBIR	0,000	Harga Beras Impor

Pada tabel 9 dapat dilihat bahwa dampak kebijakan menurunkan harga pupuk urea sebesar 25% berdampak pada pengurangan jumlah impor beras sebesar 4,085, menurunkan penawaran beras

sebesar 0,094 persen serta berdampak pada penurunan harga beras eceran sebesar 1,544. Hal tersebut berpengaruh pada pengurangan kemiskinan sebesar 0,025 persen. Kebijakan penurunan harga pupuk tidak berpengaruh pada luas areal panen, namun berpengaruh terhadap peningkatan produktivitas sebesar 0,023 dan peningkatan produksi padi sebesar 0,039 persen.

Menurunkan tarif impor beras sebesar 0 persen

Tabel 10. Dampak kebijakan penurunan tarif impor sebesar 0%

Variable	persentase (%)	Keterangan
POV	0	Kemiskinan
LAP	0	Luas Areal Panen
YPP	0	Produktivitas
PPI	0	Produksi Padi Indonesia
PBI	0	Produksi Beras Indonesia
JBB	0	Beras Susut, Benih, dll
JIB	8,357	Jumlah Impor Beras
QSBI	0,313	Penawaran Beras
DBIN	0	Permintaan Beras
HBER	0	Harga Beras Eceran
HIBIR	-4,788	Harga Beras Impor

Pada tabel 10 dapat dilihat dampak kebijakan penurunan tarif impor sebesar 0 persen, kebijakan ini tidak berpengaruh terhadap kemiskinan, luas areal, produktivitas, produksi padi, permintaan beras serta harga eceran beras di Indonesia. Namun kebijakan tersebut memberikan pengaruh terhadap peningkatan jumlah impor beras sebesar 8,357 persen serta penawaran beras sebesar 0,313 persen. Kebijakan penurunan tarif impor sebesar 0 persen memberikan dampak terhadap penurunan harga beras impor sebesar 4,788 persen. Hal tersebut mendorong adanya jumlah impor beras di Indonesia. Kebijakan penghapusan tarif impor memberikan dampak terhadap kecenderungan Indonesia

untuk lebih mengimpor beras dikarenakan harga beras impor lebih murah.

Meningkatkan harga pembelian pemerintah 25 persen

Tabel 11. Dampak kebijakan peningkatan harga pembelian pemerintah 25%

Variable	(%)	Keterangan
POV	0,035	Kemiskinan
LAP	0,000	Luas Areal Panen
YPP	0,000	Produktivitas
PPI	0,000	Produksi Padi Indonesia
PBI	0,000	Produksi Beras Indonesia
JBB	0,000	Beras Susut, Benih, dll
JIB	3,863	Jumlah Impor Beras
QSBI	0,156	Penawaran Beras
DBIN	-0,072	Permintaan Beras
HBER	2,151	Harga Beras Eceran
HIBIR	0,000	Harga Beras Impor

Pada tabel 11 dapat dilihat bahwa dampak kebijakan peningkatan harga pembelian pemerintah sebesar 25% berdampak pada penurunan permintaan beras sebesar 0,072 persen. Seiring kebijakan yang diterapkan memiliki pengaruh terhadap peningkatan jumlah impor beras sebesar 3,863 persen, meningkatkan penawaran beras sebesar 0,156 persen serta berpengaruh juga terhadap peningkatan harga beras eceran sebesar 2,151 persen. Kebijakan peningkatan harga pembelian pemerintah sebesar 25 persen memberikan pengaruh nyata terhadap pengentasan kemiskinan sebesar 0,035 persen.

Menurunkan harga pembelian pemerintah 25 persen

Pada tabel 12 dapat dilihat secara keseluruhan bahwa kebijakan penurunan harga pembelian pemerintah sebesar 25 persen memberikan dampak terhadap penurunan jumlah impor beras sebesar 3,863 persen, menurunkan penawaran beras sebesar 0,125 persen, dan berdampak juga terhadap penurunan harga beras eceran

sebesar 2,51 persen. Kebijakan penurunan harga pembelian pemerintah tidak berpengaruh terhadap beberapa variable yaitu luas areal panen, produktivitas, produksi padi dan produksi beras, serta harga beras impor di Indonesia.

Tabel 12. Dampak kebijakan menurunkan harga pembelian pemerintah 25%

Variable	persentase (%)	Keterangan
POV	-0,035	Kemiskinan
LAP	0,000	Luas Areal Panen
YPP	0,000	Produktivitas
PPI	0,000	Produksi Padi Indonesia
PBI	0,000	Produksi Beras Indonesia
JBB	0,000	Beras Susut, Benih, dll
JIB	-3,863	Jumlah Impor Beras
QSBI	-0,125	Penawaran Beras
DBIN	0,036	Permintaan Beras
HBER	-2,151	Harga Beras Eceran
HIBIR	0,000	Harga Beras Impor

Kebijakan Penghapusan harga pembelian pemerintah

Tabel 13. Dampak kebijakan menghapuskan harga pembelian pemerintah

Variable	persentase (%)	Keterangan
POV	-0,142	Kemiskinan
LAP	0,000	Luas Areal Panen
YPP	0,000	Produktivitas
PPI	0,000	Produksi Padi Indonesia
PBI	0,000	Produksi Beras Indonesia
JBB	0,000	Beras Susut, Benih, dll
JIB	-15,450	Jumlah Impor Beras
QSBI	-0,531	Penawaran Beras
DBIN	0,217	Permintaan Beras
HBER	-8,604	Harga Beras Eceran
HIBIR	0,000	Harga Beras Impor

Secara keseluruhan dampak kebijakan penghapusan harga pembelian pemerintah dapat dilihat pada tabel 13. Kebijakan penghapusan harga pembelian pemerintah memberikan dampak terhadap

penurunan kemiskinan sebesar 0,142 persen dan penurunan harga beras eceran sebesar 8,604 persen serta penurunan jumlah impor beras sebesar 15,450 persen. Selain itu, Kebijakan tersebut juga berpengaruh pada peningkatan permintaan beras sebesar 0,217 persen. Namun tidak berpengaruh terhadap luas areal panen, produktivitas, produksi padi, produksi beras, serta harga beras impor.

Meningkatkan luas areal irigasi sebesar 15 persen

Tabel 14. Dampak kebijakan meningkatkan luas areal irigasi 15%

Variable	persentase (%)	Keterangan
POV	-0,002	Kemiskinan
LAP	1,305	Luas Areal Panen
YPP	0,000	Produktivitas
PPI	1,295	Produksi Padi Indonesia
PBI	1,308	Produksi Beras Indonesia
JBB	1,289	Beras Susut, Benih, dll
JIB	-1,234	Jumlah Impor Beras
QSBI	1,125	Penawaran Beras
DBIN	0,000	Permintaan Beras
HBER	-0,117	Harga Beras Eceran
HIBIR	0,000	Harga Beras Impor

Dampak kebijakan peningkatan luas areal irigasi pada tabel 14 memberikan dampak terhadap penurunan harga beras eceran sebesar 0,117 persen, hal tersebut mendorong penurunan jumlah impor beras sebesar 1,234 persen serta mengakibatkan penurunan kemiskinan di Indonesia sebesar 0,002 persen. Kebijakan tersebut juga berpengaruh pada peningkatan luas areal panen padi sebesar 1,305, produksi padi 1,295 persen dan produksi beras 1,308 persen serta penawaran beras sebesar 1,125 persen.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Kebijakan harga yang berdampak pada pengentasan kemiskinan ada 4 antara lain: (1) kebijakan penurunan harga pupuk urea 25 persen mampu mengurangi kemiskinan 0,025 persen, (2) kebijakan menurunkan harga pembelian pemerintah 25 persen dapat mengurangi kemiskinan sebesar 0,035 persen, (3) kebijakan Penghapusan harga pembelian pemerintah juga mampu mengurangi kemiskinan sebesar 0,142 persen dan (4) kebijakan meningkatkan luas areal irigasi sebesar 15 persen dapat mengurangi pengentasan kemiskinan sebesar 0,002.
2. Dampak kebijakan impor beras yang diterapkan sebesar 0% tidak berpengaruh terhadap pengentasan kemiskinan, hal ini dapat diketahui dengan kebijakan tersebut dapat mempengaruhi jumlah peningkatan penawaran beras sebesar 0,313 persen dan berpengaruh juga terhadap jumlah impor beras di Indonesia sebesar 8,357 persen. Hal ini dikarenakan harga beras impor turun sebesar 4,788 persen sehingga kebijakan impor bukanlah kebijakan yang baik untuk diterapkan dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia.

Saran

1. Kebijakan harga yang sebaiknya menjadi fokus utama dalam pengentasan kemiskinan oleh pemerintah yaitu kebijakan penurunan harga pembelian pemerintah. Kebijakan tersebut sebaiknya menjadi acuan dan program utama dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia.
2. Selain kebijakan penurunan harga pembelian pemerintah, pemerintah juga hendaknya memperhatikan

kebijakan harga lainnya yang dapat membantu dalam pengurangan kemiskinan di Indonesia diantaranya yaitu kebijakan penurunan harga pupuk urea, kebijakan penghapusan harga pembelian pemerintah, kebijakan meningkatkan luas areal irigasi, serta kebijakan kombinasi antara kebijakan menurunkan harga pupuk urea. Kebijakan tersebut sebaiknya lebih diperhatikan dan menjadi acuan pemerintah dalam mengambil keputusan untuk mengurangi kemiskinan di Indonesia.

REFERENSI

- Koutsoyiannis. (1977). *Theory of Econometrics: An Introductory Exposition of Econometric Methods Ed ke-2*. London (GB): The MacMillan Press Ltd.
- Manning C. (1987). Public Policy Rice Production and Income Distribution: A Review of Indonesia's Rice Self Sufficiency Program. *South East Asean Journal of Social Science*, 15(1), 66–81.
- Nugroho I, D. R. (2004). *Pembangunan Wilayah, Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan*. LP3ES.
- Pindyck RS, R. D. (1991). *Econometric Models and Economic Forecasts. Ed ke-3*. McGraw-Hill Inc.
- Pratama, A. R., Sudrajat, S., & Harini, R. (2019). Analisis Ketersediaan dan Kebutuhan Beras di Indonesia Tahun 2018. *Media Komunikasi Geografi*, 20(2), 101. <https://doi.org/10.23887/mkg.v20i2.19256>
- Pratiwi1*, E. D., Ashar2, K., & Wildan Syafitri2. (2020). Dampak Kemiskinan Terhadap Pola Mobilitas Tenaga Kerja Antarsektor di

- Indonesia. *Kependudukan Indonesia*, 15(1), 1–18. File:///C:/Users/Ekalia Yusiana/Downloads/473-1777-1-PB.Pdf
- Purwono, R., Wardana, W. W., Haryanto, T., & Khoerul Mubin, M. (2021). Poverty Dynamics In Indonesia: Empirical Evidence From Three Main Approaches. *World Development Perspectives*, 23, 100346. <https://doi.org/10.1016/j.wdp.2021.100346>
- Salbiah Rizky Arifin, A. W. (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan. *Ilmu Ekonomi Mulawarman*, 1(1), 21–33. File:///C:/Users/Ekalia Yusiana/Downloads/264-11028-1-PB.Pdf
- Septiadi, D., Harianto, H., & Suharno, S. (2016). DAMPAK KEBIJAKAN HARGA BERAS DAN LUAS AREAL IRIGASI TERHADAP PENGENTASAN KEMISKINAN DI INDONESIA. *Jurnal Agribisnis Indonesia*, 4(2), 91. <https://doi.org/10.29244/jai.2016.4.2.91-106>
- World Bank. (2007). *World Development Indicators*. World Bank.